

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi merupakan kegiatan yang dilakukan seluruh warga negara untuk mencapai keinginan bersama agar terciptanya masyarakat yang madani, ada beberapa hal untuk mencapai keinginan bersama tersebut yaitu salah satunya dengan pemilihan umum pejabat negara yang dilakukan oleh warga negara, ada pun pendapat para ahli yang bereperndapat mengenai demokrasi, Munir Fuady (2010 : 2) berpendapat demokrasi adalah suatu sistem pemerintahandalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang public (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat. Dari pendapat ahli tersbut bahwa gambaran demokrasi melibatkan seluruh warga negara untuk memilih pelaksana negera dalam hal ini pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat.

Salah satu terwujudnya demokrasi dengan dilaksanakannya PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah), pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Selain itu, PILKADA juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, Peran serta masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu syarat terwujudnya nilai – nilai demokrasi, peran serta masyarakat dalam hal ini ialah partisipasi politik, dimana partisipasi politik masyarakat sangatlah penting karena dengan berpartisipasi masyarakat dapat mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat itu sendiri di daerah yang mereka tempati.

Setiap masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Masyarakat yang memiliki hak suara ini memiliki kriteria dimulai dari usia 17 tahun hingga lansia dengan syarat sehat jasmani maupun rohani. Masyarakat yang memiliki hak suara terbagi menjadi dua generasi, generasi muda diklasifikasikan dari mulai rentan umur 17 tahun hingga 35 tahun dan generasi tua dimulai rentan umur 35 hingga lansia, melalui 2 generasi inilah dapat menggambarkan pandangan politik dan sikap politik yang dapat berbeda, hal ini dapat terjadi karena pengalaman politik juga pendidikan politik yang dialami oleh dua generasi tersebut. Sebagai contoh pemilih pemula yang merupakan generasi muda dengan usia rata – rata 17 – 21 tahun yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan kepala daerah Kota Bandung. Meskipun pemilih pemula telah mendapatkan hak untuk memilih, bila dilihat dari sudut pandang lain pemilih pemula secara umum belum memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait politik. Bentuk sikap politik dari pemilih pemula dapat dilihat dari sikap politiknya secara aktif dengan mendatangi lokasi TPS atau peduli dengan dunia politik. Kepedulian yang ditunjukkan oleh pemilih pemula dalam hal ini belum tentu berkaitan dengan penggunaan hak suara. Sedangkan pemilih pemula yang bersikap secara pasif menunjukkannya dengan cara tidak mendatangi lokasi TPS dan tidak peduli dengan dunia politik.

Kota Bandung salah satu wilayah yang ikut serta pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, dengan suhu politik yang terbentuk melalui media cetak, media elektronik dan media sosial dengan cukup hangat pada tahun - tahun sebelumnya di Kota Bandung namun tidak didukung dengan pendidikan politik

pada masyarakat khususnya pada pemilih pemula, dampak tersebut mengakibatkan masyarakat khususnya pemilih pemula secara partisipasi kurang maksimal, hal ini dapat terlihat pada hasil PILKADA 2013 dan PILKADA 2018 dengan suara tidak sah dan suara golput (suara yang tidak digunakan) yang masih ada. Bisa jadi suara tidak sah dan suara golput (suara yang tidak digunakan) adalah suara mayoritas dari pemilih pemula. Berikut adalah hasil suara PIKADA 2013 dan PILKADA 2018 ;

Tabel 1.1

Suara PILKADA Kota Bandung 2013 dan 2018

TAHUN	DPT (Daftar Pemilih Tetap)	PEMILIH PEMULA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	SUARA GOLPUT	TOTAL SUARA
2013	1.657.406 Jiwa	436.133 Jiwa	959.715 Suara	43.492 Suara	654.199 Suara	1.657.715 Suara
2018	1.704.341 Jiwa	483.068 Jiwa	1.266.830 Suara	39.042 Suara	398.475 Suara	1.704.341 Suara

Sumber : KPU Kota Bandung 2019 dan BPS Kota Bandung 2019

Dengan total suara tidak sah dan suara yang tidak digunakan (GOLPUT) yang masih cukup banyak menimbulkan pertanyaan, pertanyaan sebagai berikut ;

1. Faktor pendorong partisipasi apa yang membuat partisipasi politik masyarakat khususnya pemula agar dapat maksimal.

2. Faktor penghambat partisipasi apa yang membuat partisipasi politik masyarakat khususnya pemula menjadi tidak maksimal.

Selain suara masyarakat umum, Peran bahkan suara anak muda atau bisa disebut pemilih pemula menjadi menarik untuk dibahas khususnya mengenai partisipasi pemilih pemula dalam rangkaian pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung, Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam laporan penelitian ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul :

“ MODEL PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (Studi Kasus Tentang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung) “

1.1.1 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada topik yang dipilih, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018 ?
2. Bagaimana Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan laporan ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018 Sementara tujuan dari penelitian ini di adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018
2. Untuk mengetahui Bagaimana Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018.

1.3 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsiah dan membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya dalam kajian kebijakan publik. Juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan informasi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis :

Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau sebagai masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan Partai Politik terkait dengan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Kemudian bagi masyarakat umum yaitu hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebagai tambahan pengetahuan dan dapat dikaji lebih lanjut dan juga salah satu bentuk sosialisasi mengenai partisipasi politik.